

# **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG (Suatu Studi Di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)<sup>1</sup>**

Oleh : **Marselina Kareth** <sup>2</sup>

## **ABSTRAK**

*Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagai cara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik terror dan politik uang. Pada umumnya para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling memiliki potensi besar pula untuk memenangkan pemilihan. Kepala desa Para bakal calon biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di desanya.*

*Selain menjalani aktivitas dalam Pilkades, masyarakat desa dapat juga menjadi partisipan dalam Pilkades dengan cara ikut menjadi juru kampanye (Jurkam) dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades, ikut menjadi anggota aktif dari kelompok kepentingan seperti menjadi tim sukses atau mendukung salah satu calon kades, aktif dalam proyek-proyek sosial atau program-program sosial desa seperti mempromosikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades tersebut, misalnya calonkades tersebut ingin membangun sarana air bersih bagi masyarakat desa yang belum mendapatkan sarana air bersih.*

*Hasil penelitian lewat wawancara bahwa sosialisasi politik dan pendidikan bagi warga negara teristimewa masyarakat yang sudah wajib memilih sangat penting untuk dilakukan. Upaya pelestarian sistim politik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan politik, antara lain sosialisai politik dan pendidikan politik. Kedua kegiatan komunikasi politik itu merupakan suatu proses dalam membentuk sikap dan perilaku para calon penerima sistim dan penerus sistim dimasa yang akan datang. Sosialisasi politik sering juga disamakan dengan pendidikan politik sebagai suatu aktivitas mempengaruhi, mengubah dan membentuk sikap dan perilaku berdasar nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia.*

**Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala kampung**

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos atau ada juga yang menerapkan sistem mencontreng tandagambar calon kepala desa Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung, Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa Partisipasi politik padahakekatnya sebagai ukuran untuk mempengaruhi kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi. dengan kata lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan

---

<sup>1</sup> Merupakan skripsi penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT.

ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku.

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagai cara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik terror dan politik uang. Pada umumnya para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling memiliki potensi besar pula untuk memenangkan pemilihan. Kepala desa Para bakal calon biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di desanya.

Selain menjalani aktivitas dalam Pilkades, masyarakat desa dapat juga menjadi partisipan dalam Pilkades dengan cara ikut menjadi juru kampanye (Jurkam) dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades, ikut menjadi anggota aktif dari kelompok kepentingan seperti menjadi tim sukses atau mendukung salah satu calon kades, aktif dalam proyek-proyek sosial atau program-program sosial desa seperti mempromosikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades tersebut, misalnya calonkades tersebut ingin membangun sarana air bersih bagi masyarakat desa yang belum mendapatkan sarana air bersih.

Masyarakat desa yang ikut dalam aktivitas Pilkades, menjadi partisi dalam Pilkades ada juga yang menjadi pengamat mengenai jalannya Pilkades baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan, seperti menghadiri rapat-rapat umum atau diskusi-diskusi mengenai siapa saja yang akan mencalonkan menjadi kades, mengamati siapa-siapa saja yang menjadi tim sukses dari masing-masing calon kades, mengikuti perkembangan politik dari masing-masing calonkades, pengamat tersebut juga memberikan suaranya dalam Pilkades setelah melihat dan mengamati secara langsung dari masing-masing calon kades.

Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pilkades, karena bagi sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan darisalah satu kandidat calon kepaladesa melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan-tekanan para pembotoh atau pembotoh yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung. Para pembotoh tersebut memberikan uang kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang disuruh oleh pembotoh, banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para pembotoh untuk memilih salah satu calon karena telah diberikan imbalan sebelum masuk ke dalam bilik suara.

Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon. Selain ikut dalam aktivitas pada pelaksanaan Pilkades dengan menjadi partisipan dalam pelaksanaan Pilkades dan menjadi pengamat dalam pelaksanaan Pilkades, ada juga masyarakat menjadi orang yang apathis terhadap pelaksanaan Pilkades. Orang apathis tersebut benar-benar tidak peduli tentang pelaksanaan Pilkades baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan Pilkades. Orang apathis juga bisa tidak memilih salah satu calon kades dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

### **Tinjauan Tentang Partisipasi**

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana masyarakat merupakan factor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa. Maka dari itu penulis akan menguraikan definisi partisipasi yang menurut Inu Kencana Syafie, dalam bukunya yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia, sebagai berikut :

"Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama" (Syafie, 2002: 132).

Berdasarkan pendapat di atas maka partisipasi merupakan factor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggung jawab bersama dari setiap tujuan tersebut. Selain itu Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik memberikan definisi bahwa:

"Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik" (Surbakti, 1992: 140).

Bertolak dari pendapat di atas, dapat dikatakan partisipasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu pelaksanaan demokrasi. Dimana pelaksanaan demokrasi dapat menentukan keputusan politik yang akan dibuat dan dilaksanakan pemerintah serta dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Hutington yang dikutip dari Soemarsono dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Politik yang dimaksud dengan partisipasi adalah: Partisipasi itu dapat bersifat perorangan atau secara kelompok, diorganisasikan atau secara spontan, ditopang atau sporadis, secara baik-baik atau dengan kekerasan, legal atau tidak legal, aktif atau tidak aktif (Hutington dalam Soemarsono, 2002:4.4).

Bertolak dari pendapat di atas yang dimaksud dengan partisipasi yaitu: partisipasi pada umumnya bersifat perorangan atau kelompok yang dibentuk dalam suatu organisasi secara baik-baik tanpa adanya kekerasan dalam bentuk apapun.

### **Tinjauan Tentang Desa**

Desa merupakan salah satu kesatuan terkecil masyarakat dimana masyarakat yang bermata pencaharian didominasi oleh pertanian. Tetapi penulis akan mengemukakan pengertian Desa secara umum. Pengertian Desa menurut Egon E. Berger 1995 : 121), yang dikutip dari bukunya Rahardjo yang berjudul Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, yaitu:

"Desa adalah setiap pemukiman para petani (peasant) sebenarnya factor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang melekat pada desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterkaitan terhadap wilayah ini di samping terutama untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka" (Rahardjo, 1999 : 29).

Menurut pendapat di atas, setiap pemukiman petani merupakan faktor pertanian dan bukanlah ciri-ciri yang melekat pada desa, sebenarnya ciri utama yang melekat pada desa di tandai adanya keterkaitan warga masyarakat terhadap wilayahnya yang menjadi tempat tinggal dan mata pencaharian mereka.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan pengertian desa menurut Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian yaitu :

"Desa dalam arti umum adalah desa sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini. Sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada likalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama yang tergantung kepada pertanian, desa-desa cenderung mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu yang sama" (Rahardjo, 1999: 28).

Bertolak dari pendapat di atas, desa dalam arti umum sebagai suatu gejala yang sangat umum yang ada di dunia, baik sebagai komunitas kecil baik dari tempat tinggalnya maupun pemenuhan

kebutuhan dari mata pencaharian mereka yang sesuai dengan ciri-ciri yang sama dengan wilayah mereka.

Pengertian desa menurut Haw Widjaja dalam bukunya Pemerintahan Desaan Marga adalah sebagai berikut :

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di daerah (Widjaja, 2002:65).

### **Tinjauan Tentang Masyarakat Desa**

Masyarakat desa identik dengan petani karena masyarakat desa sebagian besar bermata pencarian pertanian. Petani yang ada di pedesaan biasanya sering disebut petani kecil atau peasan. Yang dimaksud dengan peasan menurut Eric R.Wolf dalam bukunya Rahardjo, peasan adalah penghasil-penghasil pertanian yang mengerjakan tanah secara efektif, yang melakukan pekerjaan itu sebagai nafkah hidupnya, bukan sebagai bisnis yang bersifat mencari keuntungan (Rahardjo,1999: 67).

Menurut Belshaw yang masih dikutip dalam bukunya Rahardjo yang berjudul Pengantar Sosiologi Pedesaan dan pertanian yang dimaksud dengan masyarakat desa atau masyarakat peasan adalah Yang way of life-nya berorientasi pada tradisionalitas, terpisah dari pusat perkotaan tetapi memiliki keterkaitan dengannya, yang mengkombinasikan kegiatan pasar dengan produk sisubsisten.(Rahardjo, 1999: 67).

Masyarakat desa erat sekali kaitannya dengan kebudayaan tradisionalnya, bahwa kebudayaan tradisional akan tercipta apa bila masyarakat desa amat tergantung kepada pertanian,tingkat teknologinya rendah dan produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga,maka menurut Paul H. Landis (1948)yang dikutip dari bukunya Rahardjo yang berjudul Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian yaitu pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desaakan ditentukan oleh:

- 1) Sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian
- 2) Tingkat teknologi mereka
- 3) Sistem produksi yang diterapkan

### **Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Desa**

Menurut Duto Sosialis manto dalam bukunya yang berjudul Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa, yang dimaksud dengan: Pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat, dimana pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai suatu kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat desa (Sosialismanto, 2001:191). Pemilihan kepala desa biasanya dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa juga dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud dengan pemilihan kepala desa adalah peta rakyat pedesaan untuk menampilkan figur yang dapat melindungi masyarakat desa Pemilihan kepala desa harus memenuhi syarat-syarat mengenai pemilihan kepala desa.

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi politik Masyarakat Desa Karetubun dalam pemilihan kepala kampung.Oleh karena itu agar penelitian ini dapat mengetahui secara jelas terkait partisipasi tersebut, penulis memilih untuk menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Dengan metode kualitatif penulis mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam berinteraksi dengan objek penelitian, sehingga dapat memperkaya dan memperdalam kajian dalam penelitian yang penulis lakukan.

## **PEMBAHASAN**

Partisipasi politik, sebagai suatu aktivitas, tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Ada yang menyoroti faktor-faktor dari dalam diri seseorang, ada yang menyoroti faktor-faktor dari luar dan ada yang menggabungkannya. Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Hasil penelitian lewat wawancara bahwa sosialisasi politik dan pendidikan bagi warga negara teristimewa masyarakat yang sudah wajib memilih sangat penting untuk dilakukan. Upaya pelestarian sistem politik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan politik, antara lain sosialisai politik dan pendidikan politik. Kedua kegiatan komunikasi politik itu merupakan suatu proses dalam membentuk sikap dan perilaku para calon penerima sistem dan penerus sistem dimasa yang akan datang. Sosialisasi politik sering juga disamakan dengan pendidikan politik sebagai suatu aktivitas mempengaruhi, mengubah dan membentuk sikap dan perilaku berdasar nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Dari hasil pembahasan ini Menurut Weimar ( sastroadmodjo,1995:22-24 ) menyebutkan paling tidak ada 5 faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Salah satunya adalah

Menurut ( Milbrath, 2009:115-118) memberikan 3 alasan bervariasinya partisipasi politik seseorang. Alasan pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Meskipun demikian dalam menanggapi perangsang-perangsang politik itu tentu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai, pengalaman dan kepribadian yang dimiliki seseorang.

Alasan kedua, berkenaan karakteristik sosial seseorang. Status sosial ekonomi, karakteristik suku, jenis kelamin, usia keyakinan agama merupakan karakteristik sosial yang berpengaruh terhadap partisipasi politik seseorang dalam politik.

Alasan ketiga, menyangkut sifat dan sistem politik dan partai tempat seseorang itu berada. Seseorang yang hidup dalam negara-negara demokratis, partai-partai politik cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa. Karena itu massa cenderung berpartisipasi dalam politik. Dalam konteks Indonesia, Arbi Sanit menyebutkan 5 faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia. Pertama, adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang, termasuk di bidang politik. Kedua, adanya kenyataan berpolitik secara lugs dan terbuka. Ketiga, adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur. Keempat, adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat. Kelima, adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.

Dalam kepustakaan ilmu politik, dikenal adanya rumus manusia politik dari Harold D. Lasswell (1960:102-103) yaitu pribadi, ditransformasikan dan dipindahkan kegelanggang kepentingan politika atau nilai komunitas yang diterima secara luas. Hal ini dapat dipahami bahwa faktor kepribadian sangat mempengaruhi partisipasi politik. Aktivitas manusia dipanggung politik pada dasarnya merupakan tindakan partisipasi politik. Pakar Ilmu {Politik Samuel P. Huntington (1997:111-113) memandang partisipasi politik sebagai tindakan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi. Partisipasi bisa individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap

atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal dan efektif atau tidak efektif. (Miriam Budiarmo, 1998:2-3)

Partisipasi politik menurut Nimmo (1989:107) dilakukan oleh khlayak politik yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik dan pengikutnya. Dengan kata lain jika politikus sebagai komunikator politik, partisipan politik adalah khlayak politik. Partisipasi politik menurut Rosenau (1974:107-119) terdiri atas dua jenis: Pertama, para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lainnya. Mereka pada umumnya khlayak media (pembaca, pemirsa dan pendengar) serta aktif dalam diskusi, seminar dan memberikan komentar melalui media massa. Kedua, partisipan politik adalah khlayak yang bukan saja mengamati, tetapi juga giat melakukan komunikasi dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintahan atau di parlemen dan luar parlemen. Partisipasi politik ini dimobilisasi oleh komunikator politik, terutama oleh politikus.

Partisipasi politik merupakan pengejawahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam rangka demokrasi rakyatlah yang berdaulat. Dalam ranah tersebut bahwa semakin banyak partisipasi masyarakat, maka akan menjadi semakin baik, sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah maka dapat beranggapan hasilnya akan kurang baik. Dengan demikian terlihat bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor yang salah satunya adalah partisipasi politik terwujud melalui kegiatan pemilihan bukan hanya pemberian suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pemilihan umum.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitin yang berkaitan dengan Partisipasi Politik Masyarakat Papua dalam Pemilihan Kepala Kampung, adalah sebagai berikut: Kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, sifat apatis dari masyarakat itu sendiri, sosialisasi politik, distribusi surat suara yang masih belum efektif, peran media masa dalam memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat, serta kinerja dari komisi pemilihan umum daerah yang masih belum maksimal menyebabkan terjadinya kelesuan serta kurangnya partisipasi masyarakat.

### **Saran**

Melihat permasalahan yang sudah disimpulkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan peran dari pemerintah daerah dan partai politik dalam memberikan sosialisasi tentang pemilihan umum, serta pendidikan politik kepada masyarakat, agar masyarakat paham dan mengerti pentingnya arti sebuah suara dalam pemilihan Kepala Kampung.
2. Diperlukan strategi sosialisasi dari media masa dalam memberikan sosialisasi politik, melalui bentuk-bentuk pesan/penyampaian yang menarik dan mudah dimengerti, agar masyarakat dapat tergerak memberikan hak suaranya dengan kesadaran dari diri sendiri, karena mengerti mengenai pentingnya berdemokrasi.
3. Diharapkan kepedulian pemerintah, dalam memperbaiki sistim politik. Perlu adanya kampanye politik secara periodik, melakukan sosialisasi politik dan pendidikan politik bagi seluruh warga negara, agar semakin kuat nya ideologi politik dipahami oleh masyarakat, rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik semakin ditingkatkan dengan melibatkan elemen-elemen yang mampu memberikan ideologi politik demi mewujudkan kondisi berpolitikan yang sehat dan demokrasi yang sebenar-benarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT GramediaPustaka Utama
- Faturohman Deden dan Sobari Wawan. (2004). *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: PT Universitas Muhamadiyah Malang.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kuantitatif*. Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : UI Press.
- Mas'ud, Mochtar dan MacxAndrew Colin. (1985) *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Nawawi, Hadari. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: GajahMada University Press.
- Nazir, Moh. (1999). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Rahman, Arifin. (2001). *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif StrukturalFungsional*. Surabaya: SIC.
- Rush Michael dan Althoff Phillip. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gajah MadaUniversity Press.
- Rakhmat, Jalaludin. (2000). *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung: Rosda
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT GramediaWidiasarana Indonesia.
- Rudy, May. (2003). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: PT Refika AditamaSanit, Arbit. (1995). *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kekuatan PolitikDan Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindao Persada
- Soemarsono. (2002). *Komunikasi Politik*. Bandung : Universitas Terbuka
- Soehartono, Irawan. (2004). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya
- Sosialismanto, Duto. (2001). *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Siagian, H. (1989). *Pokok-Pokok Pembangunan Desa, Masyarakat Desa*. Bandung: Citra Aditya Bahkti.
- Syafiie Kencana, Inu. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia* Jakarta : RinekaCiptaInu. (2002). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Usman, Husaini. (2003). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widjaja, HAW. (2001). *Pemerintahan Desa/Marga* berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintah Daerah* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

## Sumber Lain

- UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
- Peraturan Pemerintah RI N07 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Daerah No. 4 Tahun 2000 Tentang Desa Karetubun
- Dokumen Panitia Pemilihan Kepala Kampung Karetubun tentang Peilkampung